

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi IV / 2012

**Mengintip Pasar Konstruksi Di Timor Leste Dan Asean
Dalam Rangka Memperluas Pasar Konstruksi Indonesia**

Meretas Harapan Investasi Dunia Konstruksi

LAUNCHING KONSTRUKSI INDONESIA :
KONSEP BARU KONSTRUKSI INDONESIA 2012

ISSN 1907-0136



771907 013646



Kementerian Pekerjaan Umum



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

*Kunjungi dan Saksikan
Puncak Acara Konstruksi Indonesia 2012*

PAMERAN KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Parkir Timur Senayan, 29 November - 02 Desember 2012

RANGKAIAN KEGIATAN KONSTRUKSI INDONESIA 2012 :

1. Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2012
2. Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia
3. Lomba Jurnalistik/ Karya Tulis Media Cetak
4. Lomba Karya Tulis Ilmiah terkait Konstruksi
5. Penghargaan Karya Konstruksi
6. Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi
7. Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2012
8. Seminar dan Pameran Konstruksi Indonesia 2012

Ikuti Juga

Jakarta Construction Fun Bike & Fun Walk

Parkir Timur Senayan, Minggu, 02 Desember 2012

Informasi lebih lanjut :

Sekretariat BP KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No 20 Keb Baru Jakarta Selatan

Tlp : (021) 7266639, Fax : (021) 727 97 848

Email : datinfo25@yahoo.com

BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin.

Pemimpin Redaksi :
Hambali.

Penyunting / Editor :
Kristinawati Pratiwi Hadi;
Dendy Rahadian.

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo;
Budiasih Dyah Saraswati;
Koko Gilang Nugroho;
Anjar Pramularsi;
Maria Ulfah.

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin;
Sugeng Sunyoto;
Agus Firngadi;
Ahmad Suyaman;
Ahmad Iqbal.

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriyadi;
Y. Bisma Wikantayasa.

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo.

Alamat Redaksi :
Jl. Pattimura No.20
Gd.Bina Marga Lt.5 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo25@yahoo.com

Salam dari redaksi

Para Pembaca yang berbahagia, masih dalam suasana Bulan Syawal 1433 H Kami ingin menghaturkan Selamat Hari Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin atas segala khilaf dan alfa selama kami hadir ditengah-tengah Anda, niat tulus kami mudah-mudahan dibukakan pintu maaf dari Pembaca sekalian. Salam hangat dan bersemangat dari kami terus menerus dikumandangkan. Puji syukur kepada Tuhan YME kita masih diberikan usia untuk bertemu kembali di Buletin Badan Pembinaan Konstruksi, setelah menjalani aktifitas di bulan Ramadhan lalu dilanjutkan cuti bersama lebaran.

Pembaca yang terhormat, Tak Terasa kita sudah masuk di Quartal ke-3 di tahun 2012 ini, semoga semangat dan daya tahan kita bisa terus kita pacu sampai dipenghujung tahun nanti. Lalu bagaimana kabar target pencapaian Anda? tentu doa yang terbaik dari kami untuk para pembaca sekalian semoga dalam beraktifitas selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Tuhan YME.

Pantauan mata kita dalam sebulan ke belakang dibuat penasaran dengan "perpindahan penduduk secara massal dalam satu waktu" yang menyebabkan kepadatan di beberapa ruas jalan dan daerah. Dengan serta merta informasi tersebut mengalir deras dari tv, radio dan media cetak lainnya, pada edisi kali ini, kami mencoba untuk membuka jendela lain yang mungkin tak tersentuh oleh hingar-bingar berita di atas, semoga buletin kami dapat menjadi alternatif bagi anda.

Pada edisi IV Juli - Agustus 2012 ini kami hadir kembali dengan bingkai : Bagaimana Potensi pasar Konstruksi di ASEAN dan negara Timor Leste, sanggupkah Indonesia ikut berperan dalam pembangunan di wilayah tersebut ? Kita intip juga, ASBUTON dan potensinya, pasokan aspal nasional saat ini mengalami defisit yang besar, Potensi aspal alam di pulau Buton (Asbuton) diharapkan dapat mengisi kekurangan pasokan aspal nasional tersebut.

Gendrang Konstruksi Indonesia 2012 sudah mulai menggema, Launching Konstruksi Indonesia dilakukan, akan ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konstruksi Indonesia khususnya acara Pameran dan Seminar yang akan dilaksanakan di Parkir Timur Senayan ini. Selain itu, rekan-rekan dari Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Nanggroe Aceh Darussalam mengadakan workplace assesor BNSP assessment, trauma Bencana Tsunami 2004 lalu, membuat masyarakat asli Aceh terus bangkit dari "tidur".

Pembaca yang budiman Buletin Badan Pembinaan Konstruksi berusaha untuk memahami keingintahuan anda, semoga bermanfaat dan Selamat membaca.

*Salam Hangat dan Bersemangat
_REDAKSI*

Daftar Isi

► Mengintip Pasar Konstruksi di Timur Leste dan Asean dalam rangka Memperluas Pasar Konstruksi Indonesia	2
► Potensi Aspal Asbuton	5
► Nanggroe Aceh Darussalam akan Terus Membangun dan Terus Melakukan Penyiapan SDM Konstruksi Berkualitas	8
► Meretas Harapan Investasi Dunia Konstruksi	11
► Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional yang Kokoh Dan menunjang Pemerataan Kesempatan Kerja bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi	13
► Pelatihan <i>GreenShip Associate Plus</i> : mencetak Agen-agen Perubahan (<i>Agent of Change</i>) dalam Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan	17
► Launching Konstruksi Indonesia : Konsep Baru Konstruksi Indonesia 2012	18
► Serahterima Jabatan di Lingkungan BP Konstruksi : Harapan akan Apresiasi Tugas BP Konstruksi yang Semakin meningkat	21



MENGINTIP PASAR KONSTRUKSI DI TIMOR LESTE DAN ASEAN DALAM RANGKA MEMPERLUAS PASAR KONSTRUKSI INDONESIA

Berdasarkan data (BCIAsia dan sumber lain), nilai kapitalisasi konstruksi berupa pekerjaan yang ditawarkan pada lima negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) untuk kuartal pertama tahun 2012 adalah sekitar USD\$14,7 miliar. Sedangkan, Timor Leste menawarkan proyek konstruksi senilai tidak kurang dari USD\$ 2,8 miliar untuk periode tahun 2011-2015. "Ini pertanda bahwa pasar jasa konstruksi di ASEAN dan Timor Leste harus jadi perhatian utama dari pelaku jasa konstruksi nasional untuk mengembangkan sayap ke luar negeri", ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno pada Forum Konsultasi Pengembangan Jasa Konstruksi ke ASEAN dan Timor Leste, di Jakarta.

Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)

Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Tripurna Jaya, memaparkan pandangannya tentang pasar Konstruksi ASEAN, dipetakan, lebih ke prioritas realisasi pembangunan infrastruktur 'Master

Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)'. Connectivity sebagai strategi untuk merealisasikan Komunitas ASEAN 2015 dan merupakan inisiatif untuk mengembangkan jejaring infrastruktur, transportasi dan ICT (*Information and communication Technology*) di kawasan ASEAN dan Asia Timur. Connectivity diharapkan mampu mewujudkan kerja sama antar pemerintah maupun antara pemerintah dengan swasta (*public-private-partnership*) sehingga MPAC dapat realisasi.

Beberapa contoh proyek konstruksi MPAC, diantaranya ASEAN Highway Network, 23 rute yang telah disepakati dengan total 38.400 kilometer untuk seluruh ASEAN. *Maritime Transport*, 47 pelabuhan sebagai pelabuhan utama dalam *trans-ASEAN Transport Network* dengan fasilitas infrastruktur pelabuhan yang masih perlu dikembangkan. *ICT Infrastructure Development*, Meliputi pembangunan infrastruktur untuk jaringan komunikasi fixed line, mobile, satellite dan internet. *Energy Infrastructure Development*, Sesuai

dengan *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2010-2015* pada tahun 2013 diharapkan sudah selesai Trans ASEAN Gas Pipeline dengan total panjang 3200 kilometer. Selain itu ada 8 proyek *interconnection gas pipeline* yang dilaksanakan secara bilateral di ASEAN dengan total sepanjang 2300 kilometer.

Pandangan lain, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, pencabutan sanksi ekonomi oleh banyak pihak terhadap Myanmar akan menggiring Pemerintah Myanmar membuka peluang investasi bagi para investor asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek di Myanmar yang terbuka terhadap investasi asing diantaranya adalah proyek-proyek jalan raya, jalur kereta api, pembangunan bandara, pipa gas, pipa minyak bumi serta pembangunan ladang hydropower. Namun mengingat bahwa masih adanya kesulitan untuk mengakses pasar di Myanmar, sebaiknya skema yang dilakukan dalam penetrasi pasar adalah skema G to G.

Pasar Konstruksi Timor Leste

Sementara itu Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste terus berlanjut. Dengan ditandatanganinya *Letter of Intent (LoI) between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Democratic Republic of Timor Leste on Development of a Regional Integrated Economic Approach* pada Mei lalu oleh Menteri Luar Negeri kedua Negara, kedua belah negara sepakat untuk saling terhubung / terkoneksi antara koridor ekonomi Indonesia dengan koridor ekonomi (*Growth Pole*) Timor Leste. Pengkoneksian koridor ekonomi ini dilakukan guna memperlancar ekspor Indonesia khususnya ekspor jasa konstruksi ke Timor Leste.

Timor Leste ingin mengintegrasikan sektor ekonominya guna mendorong pembangunan di kedua negara, terutama dengan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disambut baik Indonesia, mengingat adanya kepentingan bersama dalam memajukan perekonomian di kawasan tersebut. Menteri

Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Hatta Rajasa, sempat mengutarakan bahwa konsep tersebut akan menggabungkan pembangunan Timor Leste dengan koridor lima dan koridor enam dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Koridor lima merupakan koridor Bali-Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan fokus sektornya adalah pariwisata, pertanian, dan peternakan. Sedangkan, koridor enam di Papua-Maluku dengan fokus pada sektor pertambangan, terutama emas, pertanian, dan perkebunan.

Sementara itu, sebelum di tanda tangani *Letter of Intent* (LoI) Tersebut, pada tahun 2011 Kementerian PU sudah memiliki MoU dengan Kementerian Konstruksi Timor Leste. Di sektor Infrastruktur terdapat kesepakatan teknis yang ditandatangani di Jakarta pada Maret 2011. Kerjasama bidang Infrastruktur dalam MoU tersebut meliputi bidang jalan dan jembatan, penyediaan air dan sanitasi, perumahan dan pemukiman. Kerjasama yang diatur meliputi antara lain kerjasama kontraktor kedua negara, pelaksanaan program pelatihan, saling tukar informasi, saling tukar dan penugasan pejabat tinggi dan tenaga ahli, dan lain sebagainya.

Kondisi Negara Timor Leste, Saat Ini Menurut Duta Besar RI untuk Timor Leste, Eddy Setiabudhi, pada dasarnya pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur dan Industri strategis di Timor Leste terbuka untuk badan usaha asing melalui proses tender terbuka. Keterbukaan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan Timor Leste mengenai kapasitas kelembagaan termasuk keahlian dan teknologi.

“Kondisi sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan politik di Timor Leste saat ini relatif kondusif sehingga berimbas pada iklim investasi dan perdagangan yang hingga saat ini dinilai relatif aman. Secara hubungan sosial warga negara Timor Leste lebih bisa menerima warga negara Indonesia dalam berbisnis atau berpartner bisnis dari pada bangsa lain, karena masih terdapat nilai-nilai historis antara kedua negara yang dulu pernah menjadi satu bagian”, ujar Eddy Setiabudhi.

Nilai-nilai tersebut menjadi benefit bagi Indonesia untuk masuk dan mengembangkan market share perdagangan jasanya di Timor Leste. Dan iklim politik Timor Leste pada saat ini lebih demokratis sehingga warga negara Timor Leste lebih dewasa untuk diajak berkolaborasi dan bekerjasama. Kondisi permintaan tinggi Timor Leste yang masih tergantung dari supply

Indonesia merupakan peluang untuk mengembangkan market share produk Indonesia di sana. Infrastruktur merupakan faktor utama untuk menunjang perdagangan antar kedua Negara tersebut.

Hal ini menunjukkan peluang bagi BUKN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut baik dari Indonesia maupun Timor Leste yang mengacu pada terciptanya konektivitas antar Negara. KBRI di Timor Leste merupakan salah satu bagian yang akan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi negara tersebut. Meskipun belum mampu mengakomodir informasi seluruh sektor perdagangan disana, namun Kedutaan siap membantu dan mendukung ekspor perdagangan jasa ke Timor Leste.

Dengan adanya MoU antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Konstruksi Timor Leste, diharapkan bisa lebih memfasilitasi secara optimal perdagangan jasa konstruksi dengan Timor Leste supaya lebih efektif dan efisien.

Upaya Pemerintah

Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU, melalui Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, Moch. Natsir, memperhatikan hal yang harus dipersiapkan oleh para BUKN yang siap dalam mengembangkan market



share ke luar negeri, khususnya harus terdapat karakteristik positif dari negara tujuan ekspor untuk menerima produk, selain itu harus memahami situasi lokal Negara setempat sebagai fasilitas untuk memasuki *entry barrier* perdagangan Negara setempat, sehingga diperlukan mapping data demand tujuan ekspor sebagai tolok ukur perkembangan masterplan demand pembangunan infrastruktur Negara setempat dengan *supply* kita miliki sebagai Negara pengekspor untuk jangka panjang.

Dalam menggali informasi hal tersebut diperlukan market intelegent yang berasal dari pihak pemerintah (dalam hal ini KBRI) maupun swasta sebagai penunjang akurasi informasi data mapping. BUJK yang berekspansi ke luar perlu kerjasama dan dukungan sehingga perlu dibentuk *incorporated* yang mampu berkompetisi di luar negeri. Eksistensi *Incorporated* dalam jangka panjang diharapkan bisa menggandeng *supply-chain* nya untuk mengembangkan business-plan di pasar luar negeri.

Melihat ketergantungan Timor Leste akan barang material konstruksi Indonesia maka industri material perlu dibangun di Nusa Tenggara Timur sebagai langkah strategis untuk membangun *supply-chain* material ke pasar Timor Leste. Selain itu *Tax treaty* merupakan kebijakan fiskal yang perlu dirundingkan dengan Timor Leste untuk mengurangi market *barrier* dan memicu perkembangan potensi perdagangan jasa konstruksi di Timor Leste.

Sementara itu Praktisi, Direktur INCIDS, Akhmad Suraji, berpendapat untuk mengembangkan access pasar diperlukan studi yang empiric dan komprehensif mengenai informasi pasar negara tujuan ekspor jasa konstruksi karena akan menentukan strategi BUJKN untuk mengembangkan *business plan* sekaligus market share nya di negara tersebut. Informasi struktur pasar konstruksi Negara tujuan ekspor merupakan modal utama BUJKN untuk mengetahui performance Badan Usaha yang

berkompetisi dinegara tersebut, sehingga BUJKN bisa mempersiapkan atau meng-conduct dirinya agar berdaya saing untuk berkompetisi di negara tersebut.

Akhmad Suraji pun menekankan, perlu *Leading Partner* berbentuk Indonesian *Incorporated* yang diatur dengan Perpres, Diperlukan *National Capacity Assesment* untuk mengetahui seberapa kuatkah kita untuk berekspansi ke luar negeri.

Unsur Pemerintah lain, melalui Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, sependapat dengan Ahmad Suraji, studi informasi pasar sangat dibutuhkan untuk menentukan strategi kebijakan baik pemerintah dan badan usaha. Kerjasama dari pihak pemerintah dan swasta nasional sangat dibutuhkan yang bergerak sebagai market intelegent dan akademisi untuk bisa menghasilkan informasi pasar negara tujuan ekspor.

Masuk ke pasar negara tujuan ekspor perlakuannya tidak hanya sebatas perjanjian G to G (antara Pemerintah Negara) namun juga harus melibatkan sektor terkait dalam perdagangan jasa internasional. Poin lain yang penting adalah Promosi, karena dapat menjadi kunci akses ke market entry. Dengan promosi akan menarik negara tujuan, atau menarik badan usaha Negara setempat untuk bekerja sama, serta berekspansi ke Negara lain.

Kondisi Permodalan dan Penjaminan di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) melalui Direktur Utama LPEI, I Made Gede Erata, mengutarakan LPEI mendukung penuh pembiayaan ekspor keluar negeri dan pembiayaan pembangunan akses ekspor (infrastruktur ekspor) keluar negeri. Contoh pembiayaan yang sudah dilakukan LPEI di Timor Leste adalah Pembangunan PLTD Betano Timor Leste dengan jenis penjaminan *Performance Guarantee* dan *Advance Payment Guarantee*.

Tingkat Resiko Negara menjadi perhatian bagi LPEI untuk memberikan bantuan pembiayaan namun tidak seketat bank konvensional, LPEI akan berkonsultasi dengan Badan Usaha pemohon tentang kondisi project di negara tersebut, jika dimungkinkan LPEI akan mencari partner sebagai upaya untuk membantu pembiayaan ekspor Badan Usaha Nasional tersebut.

Seperti yang diketahui LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) merupakan lembaga keuangan yang tidak sama dengan bank konvensional, pada dasarnya bank konvensional merujuk pada UU Perbankan, sedangkan, LPEI merujuk pada UU Nomor 2 tahun 2009 yang memiliki tugas khusus Pembiayaan Ekspor Nasional. Produk LPEI diantaranya Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi.

Sementara itu, pandangan dari salah satu asosiasi yaitu AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) mengutarakan bahwa sumber daya konstruksi Indonesia mampu untuk bersaing dengan negara lain. Melihat dari pengalaman anggota-anggotanya sebagai subkontraktor di negara Timur-Tengah dan Afrika Utara, tenaga kerja konstruksi Indonesia mampu memiliki keterampilan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang memang bertolak belakang dengan spesialisasi pekerjaan dan tenaga kerja konstruksi Indonesia, mampu bertahan bekerja pada beberapa suhu yang dinilai ekstrem, sedangkan untuk output pekerjaan juga sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan kontraktor utama dan *owner*.

Salah satu contoh Negara yang sukses mengeksport jasa konstruksinya yaitu China, mereka memiliki konsorsium yang bagus saat mereka mengeksport jasanya. Pemerintah China datang sebagai leader kerjasama yang memasarkan Badan Usaha Nasional yang terdiri dari, Badan Usaha Jasa Konstruksi dan *supply-chain* serta Lembaga Keuangan (Bank) sebagai pendukung modalitasnya. (Jef-Dnd)



POTENSI ASPAL ASBUTON

Pasokan aspal nasional saat ini mengalami defisit yang sangat besar, Potensi aspal alam di Pulau Buton (Asbuton) diharapkan dapat mengisi kekurangan pasokan aspal nasional tersebut

Pembangunan Infrastruktur disuatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor utama adalah ketersediaan akses menuju ke wilayah tersebut. Banyak wilayah daerah terpencil di Indonesia yang kurang berkembang karena sulitnya akses menuju ke daerah tersebut sehingga menyebabkan perkembangan wilayah menjadi terhambat karena kurangnya infrastruktur sarana dalam mendukung perekonomian wilayah tersebut. Jalan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat. Dengan adanya jalan, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual ke luar wilayah itu. Selain itu, jalan juga

mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya.

Pemerintah dalam usahanya mengembangkan perekonomian daerah terpencil telah merencanakan

pengembangan jaringan jalan untuk mendukung komoditas pasar dan pembangunan infrastruktur di daerah, yang meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan (km)

PULAU	JALAN NASIONAL	JALAN NASIONAL TOL		JALAN LINTAS	JALAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA
		OPERASI	RENCANA		
Sumatera	11.568,118	42,700	2.805,200	10.079,836	2.284,367
Jawa	5.611,007	697,120	1.675,710	5.867,180	1.973,890
Kalimantan	6.363,639	-	7,500	8.267,198	1.619,978
Bali-Nusa Tenggara	2.574,085	-	84,000	2.009,675	1.308,753
Sulawesi	7.799,760	17,650	46,000	7.030,531	1.001,006
Maluku-Papua	4.653,214	-	-	6.645,909	3.389,813
TOTAL	38.569,823	757,470	4.618,410	39.900,33	11.577,807

Ket:

- Jalan Lintas Termasuk: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Strategis Nasional
- Panjang jalan dalam Km

Rencana pengembangan jalan ini tentu saja memerlukan material aspal dalam jumlah yang sangat banyak, Jumlah pasokan aspal minyak semakin sukar ditemukan dan harganya semakin meningkat sehingga optimalisasi aspal alam sangat diperlukan. Pasokan aspal nasional dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jalan di Indonesia pada saat ini mengalami defisit yang sangat besar. Potensi aspal alam di pulau Buton (Asbuton) diharapkan dapat mengisi kekurangan pasokan aspal nasional tersebut, secara teknis Asbuton menunjukkan kinerja yang baik. Potensi deposit aspal alam di pulau Buton merupakan yang terbesar di dunia.



Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PU, menunjukkan bahwa Perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton dengan treatment yang benar menunjukkan kualitas yang baik, khususnya untuk jalan dengan lalu lintas ringan (LPMA).

Kegagalan perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton umumnya terjadi karena Human error (treatment yang tidak tepat dalam pelaksanaannya), terutama perhatian terhadap kadar air. Asbuton sebagai aditif dalam campuran beraspal telah terbukti memiliki kinerja yang baik. Umur jalan yang semula direncanakan bertahan hingga 5 tahun ternyata dapat dilampaui, bahkan dapat bertahan hingga 8 tahun.

Asbuton preblended dapat dihasilkan dengan menggunakan pelarut yang lebih aman (bukan

asam kuat) dan murah. Dengan pelarut *Non Oil Base*, bitumen Asbuton dapat dihasilkan dengan sifat yang memenuhi spesifikasi BM, Campuran beraspal dengan binder dari bitumen Asbuton cocok untuk jalan berlalu lintas berat dan bercuaca panas.

Produksi Asbuton dalam skala industri masih mengalami beberapa hambatan, antara lain distribusi dan kepastian pasar. Inovasi teknologi pengolahan Asbuton telah mengalami perkembangan yang pesat. Teknologi "*full ekstraksi*" berbasis air yang dikembangkan Pusjatan telah dapat menghasilkan Asbuton murni dengan karakteristik tinggi dan harga yang murah, sehingga layak didorong menjadi tahap industri. Untuk tumbuh menjadi industri aspal yang berdaya saing, diperlukan berbagai insentif hingga industri Asbuton menjadi cukup "dewasa". Adapun beberapa insentif yang diperlukan antara lain sebagai berikut:

- Pemberian Tax Holiday bagi industri Asbuton atau dengan kebijakan *Disintensif Tax* untuk aspal minyak
- insentif percepatan pelaksanaan eksplorasi, operasi dan produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-Operasi dan Produksi
- insentif inovasi teknologi produksi Asbuton

Kebijakan pengembangan industri Asbuton mencakup berbagai aspek, mulai dari hulu hingga ke hilir yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait. Sinergi diantara seluruh pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga terkait) merupakan kunci utama bagi terwujudnya industrialisasi Asbuton untuk mengamankan rantai pasok material aspal di Indonesia, yaitu dengan adanya suatu kebijakan umum pemanfaatan aspal buton yang terintegrasi dengan cara penyusunan *quick win* dari masing-masing instansi terkait untuk dapat mendukung terwujudnya industrialisasi Asbuton.

Bukti di atas menunjukkan bahwa Asbuton memiliki potensi industri yang menjanjikan sebagai bahan perkerasan jalan, Kegagalan

perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton umumnya terjadi karena *Human error* (treatment yang tidak tepat dalam pelaksanaannya), terutama perhatian terhadap kadar air. Kegagalan produk Asbuton dapat ditekan dengan pembekalan pengetahuan mengenai penanganan Asbuton yang tepat kepada para pelaksana di lapangan. DPD RI telah memberikan rekomendasi untuk penerapan LPMA pada proyek PNPM-Mandiri di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2012. Dalam agenda pemberdayaan Asbuton perlu melibatkan Kementerian Keuangan, terkait pemberian tax holiday untuk industri Asbuton. Sistem distribusi Asbuton dengan pola cluster memungkinkan Asbuton didapatkan dengan lebih mudah, murah, dan cepat.

Dengan memperbaiki rantai pasok, harga Asbuton dapat ditekan lagi, Ditambah dengan pembaharuan data mengenai tempat-tempat yang mengandung Asbuton dan jumlah depositnya dapat menjadi insentif bagi investor yang berminat dengan Asbuton.

Kerjasama diantara seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama bagi terwujudnya industrialisasi Asbuton untuk mengamankan rantai pasok material aspal, Agar industrialisasi Asbuton dapat segera terwujud, perlu segera dibentuk suatu Gugus Tugas penanganan Asbuton, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (wilayah Sulawesi) untuk membahas *grand strategy* pembiayaan rencana tindak, kesepakatan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi Asbuton, serta melakukan penyusunan *Blue Print/Road Map* pengembangan Asbuton.

Penyusunan rencana pemanfaatan Asbuton untuk jangka menengah dan jangka panjang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selaku pengguna utama aspal nasional sangat diperlukan untuk memberikan jaminan pasar bagi para pelaku industri Asbuton. Penempatan lokasi pabrik Asbuton yang berada di Pulau Buton akan dapat menekan biaya produksi.

Updating deposit Asbuton yang dilakukan Pusjatan perlu dilanjutkan hingga didapatkan volume deposit yang layak untuk diusahakan beserta kadar bitumen yang terkandung didalamnya, sehingga para investor dapat lebih yakin dalam menyusun bussiness plannya.

Perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung, meliputi jalan akses, pelabuhan dan kapal untuk distribusi Asbuton ke gudang-gudang regional (Gudang level I) untuk disebarkan lagi ke seluruh wilayah Indonesia, Badan

Pembinaan Konstruksi memegang peranan penting dalam menyusun Pengembangan Pola Investasi, Promosi Investasi dan Fasilitas Pengembangan industri Asbuton. Kabupaten Buton Utara telah menyatakan kesediannya untuk dijadikan sebagai wilayah percontohan penggunaan produk Asbuton, sehingga dapat dijadikan sasaran awal program percontohan pemanfaatan Asbuton.

Selanjutnya sasaran dapat ditingkatkan menjadi jalan Kabupaten yang ada di seluruh Wilayah Indonesia sepanjang 288

km, Industrialisasi Asbuton, implementasi produk dan sistem distribusinya memerlukan perencanaan dan pengawasan yang baik agar trauma produk Asbuton yang terjadi pada tahun 2007 yaitu besarnya permintaan dan minimnya pasokan Asbuton pada tahun itu membuat beberapa oknum melakukan pengoplosan Asbuton dengan serbuk gergaji/material lainnya, yang menyebabkan kualitas Asbuton yang digunakan rendah dan *brand image* menjadi rusak (trauma bagi para pengguna). Mudah-mudahan hal ini tidak sampai terulang kembali. (Ggh).



Kondisi LPMA (jalan dengan lalu lintas ringan)
Setelah satu tahun masa layanan



Perbedaan Asbuton yang dilalui lalu lintas dan tidak

Seluruh Pimpinan dan Staf
Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum

Mengucapkan

Selamat idul Fitri
1 Syawal 1433 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

NANGROE ACEH DARUSSALAM AKAN TERUS MEMBANGUN DAN TERUS MELAKUKAN PENYIAPAN SDM KONSTRUKSI BERKUALITAS

Workplace Assesor BNSP Assessment
di Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I NAD, Pusbin KPK



terganggu karena trauma yang mendalam akibat gempa dan tsunami tersebut. Infrastruktur daerah terus menerus diperbaiki, fasilitas gedung pemerintahan, fasilitas umum dibangun oleh sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk SDM konstruksi dari bantuan luar negeri.

Aceh akan terus membangun, seperti judul artikel ini, dengan memanfaatkan sdm konstruksi dari wilayah sendiri, Aceh terus melakukan pembenahan.

Kualitas SDM di suatu wilayah di sebuah negara selalu menjadi perhatian pemerintah. "Begitupun dengan Pemerintah Indonesia yang sampai dengan saat ini tetap memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam mengejar ketertinggalan dengan negara maju", ujar Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Sutjipto, yang mewakili Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi pada pembukaan WORKPLACE ASSESOR BNSP ASSESSMENT DI BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI WILAYAH I NAD, PUSBIN KPK.

Pembangunan sumberdaya manusia termasuk faktor yang sangat penting untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Indonesia sangat

Genap 8 tahun yang lalu tepatnya 26 Desember 2004, peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh Indonesia bahkan masyarakat seluruh dunia, hari minggu, beberapa hari menjelang pergantian tahun di 2004. Pukul 07.58 WIB, Terjadi guncangan yang super dahsyat yang berasal dari Samudera Hindia. Ketika itu kekuatan gempa, diperkirakan antara 8,9 - 9,2 skala richter, dan diklaim sebagai gempa bumi terdahsyat selama 40 tahun ke belakang. Gempa yang mengakibatkan Tsunami setinggi 9 meter ini meluluhlantakan wilayah Aceh, Sumut, Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai timur India, Srilangka, bahkan hingga Pantai Timur Afrika.

Mengkhawatirkan kata pertama yang tergambar tentang kondisi salah satu Provinsi paling barat di

Indonesia, tepatnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Banda Aceh, tercatat lebih 200.000 jiwa tewas dalam peristiwa tersebut. Bangunan hancur berkeping, infrastruktur rusak tak berbekas, tak bisa ditutupi mata seluruh penduduk dunia tertuju ke Aceh.

Berbagai jenis bantuan dan simpatisan relawan terus berdatangan dari penduduk Indonesia dan masyarakat luar negeri, semua timbul secara spontan atas dasar kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali Aceh, untuk melahirkan kembali Aceh yang normal dengan ke-khasan-nya, pasca didera musibah yang membuat penduduknya terguncang, bahkan banyak yang secara psikologis



membutuhkan sdm yang berkualitas untuk membangun negara tercinta ini, termasuk sdm dalam skala profesi tenaga kerja konstruksi, data BPS menyebutkan di sektor ini berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja (data tahun 2011) berkisar antara 6,2 juta, Hal ini menunjukan tenaga kerja yang diserap sektor konstruksi sebesar 5,7% dari total angkatan kerja sebesar 100 juta jiwa. "Sektor ini mampu membantu perekonomian negara untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan", ujar Kepala Balai. Prioritas pengentasan ini ditetapkan sebagai salah satu sasaran pokok dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dijabarkan ke dalam berbagai prioritas pembangunan sekaligus menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan menciptakan lapangan pekerjaan produktif.

Pemerintah Indonesia melalui unit terkait Kementerian, menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat melakukan pembinaan di sektor ini, Badan Pembinaan Konstruksi, memiliki unit eselon II dikomandoi oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PUSBIN KPK), Panani Kesai, beserta jajarannya bersatu padu untuk melakukan pembinaan yang sejalan dengan tuntutan dan perkembangan



serta pertumbuhan pembangunan nasional.

Kementerian PU dituntut untuk dapat membina tenaga kerja konstruksi yang profesional, handal, beretika dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM konstruksi tersebut dilakukan antara lain melalui kegiatan pelatihan, pengujian dan pembekalan bidang konstruksi oleh Balai-balai pendidikan dan pelatihan.



Salah satu Balai pelatihan konstruksi yang dimiliki Kementerian PU, yakni Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh yang hadir untuk memenuhi visi terwujudnya Balai Pelatihan Konstruksi sebagai percontohan, pengembangan dan pelatihan industri konstruksi di Sumatera maupun di Aceh pada khususnya.

Percepatan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di provinsi NAD diperlukan Assessor dan tenaga Instruktur yang tidak sedikit. Assessor dan tenaga Instruktur tersebut dimanfaatkan untuk

pengembangan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Uji yang berbasis Kompetensi.

Harapannya Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, beserta LPJK Provinsi mampu menjalankan fungsi pemberdayaan. Para pemangku kepentingan di atas dapat memberdayakan “anak daerah”, masyarakat setempat untuk menjadi Assessor dan instruktur.

Pelatihan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, pada awal Juli lalu melaksanakan Workplace Assessor BNSP Assessment yang dilaksanakan di kota Banda Aceh, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah-I Banda Aceh bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Banda Aceh, GFA Consulting Group, dengan dukungan sponsor dari GIZ (*Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit*), Jerman, dengan programnya yaitu SED-TVET (*Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training*) yang semakin menajamkan sasarannya untuk mencetak tenaga kerja konstruksi kompeten. Lembaga ini memiliki tujuan yang sejalan dengan Kementerian PU dalam peningkatan kemampuan kaum muda Indonesia terutama yang tidak bekerja melalui pelatihan-pelatihan di SMK dan balai pelatihan. GIZ juga adalah badan yang membantu upaya recovery Provinsi NAD pasca Tsunami 2004, terutama untuk pendidikan usia muda.

Sebanyak 23 (duapuluhtiga) orang peserta yang berasal dari guru-guru SMK Negeri 2 Banda Aceh dan SMK Negeri 1 Blang Pidie terpilih dan terseleksi oleh *GFA Consulting Group* dengan berbagai persyaratan akademis dan administratif untuk menjadi peserta assessor, pada akhir kegiatan dilakukan pula real assessment, untuk menentukan Kompetensi yang baik atau Belum sebagai Assessor.

Peserta Workplace Assessor BNSP Assessment diberikan materi yang disesuaikan dengan Standar Keahlian Kerja (SKK) dan Standar Latihan Keterampilan (SLK) oleh para instruktur sebanyak 3 modul, diantaranya Merencanakan dan Mengorganisasikan Asesmen, Mengembangkan Perangkat Asesmen, Mengases Kompetensi.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pada seluruh materi selama pelatihan, dilakukan evaluasi berupa role play dan asesmen mandiri. Adapun hasilnya dari jumlah peserta pelatihan sebanyak 23 orang, dengan hasil 22 orang dinyatakan lulus.

Peserta yang berhak mengikuti real assesment oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebanyak 22 orang dengan hasil kesemua 22 orang tersebut dinyatakan Kompeten. Sangat positif sekali bukan? Ke depan Diharapkan pelatihan *Workplace Assessor BNSP Assessment* dapat diselenggarakan lagi agar lebih banyak lagi tenaga-tenaga assessor yang handal di Indonesia khususnya di Aceh, selain itu penyelenggaraan kegiatan ini dapat diselenggarakan untuk bidang-bidang konstruksi lainnya. Semoga !!



MERETAS HARAPAN INVESTASI DUNIA KONSTRUKSI

Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung perbaikan dan peningkatan ekonomi Indonesia, menghendaki pemerintah untuk menyiapkan berbagai dukungan pendanaan (fiskal) dan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta ke Indonesia.

Berdasarkan “*The Global Competitiveness Report 2011-2012*” yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, daya saing Indonesia berada pada peringkat 46 dari 142 negara, yang artinya menurun 2 peringkat dari tahun 2010-2011. Infrastruktur merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kajian empirik menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. *Islamic Development Bank (IDB)* 2010 melaporkan bahwa kenaikan investasi infrastruktur sebesar 1% di Indonesia akan memberikan kontribusi sebesar 0,3% terhadap PDB. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menetapkan “Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)” yang didasarkan pada pendekatan “Koridor Ekonomi”. Disamping itu, Pemerintah juga telah menetapkan rencana aksi untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, yang bertemakan Percepatan dan

Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, antara lain melalui kenaikan alokasi anggaran belanja modal yang relatif besar untuk mendukung penambahan kapasitas infrastruktur, perluasan sarana konektivitas dalam negeri, serta peningkatan ketahanan energi. Dengan adanya penambahan alokasi anggaran belanja ini maka anggaran sektor pekerjaan umum dan sektor transportasi meningkat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah telah memproyeksikan besarnya nilai investasi dalam infrastruktur selama kurun waktu 2010-2014 sebesar Rp1.923,7 Triliun. Kebutuhan tersebut diperhitungkan berdasarkan asumsi, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,5-5,6% pada Tahun 2010 menjadi 7,0-7,7% pada Tahun 2014 diperlukan dana pembangunan infrastruktur minimal sebesar 5% dari PDB per tahun. Kebutuhan tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari berbagai sumber, yaitu APBN sebesar Rp559,54 Triliun

(29%), APBD sebesar Rp355,07 Triliun (18%), BUMN dan BUMD sebesar Rp340,85 Triliun (18%), serta dari swasta sebesar Rp344,67 Triliun (18%). Dalam hal ini masih terdapat gap pendanaan sebesar Rp 323,67 Triliun (17%). Untuk itu diperlukan partisipasi swasta untuk mengisi gap pendanaan tersebut melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS).

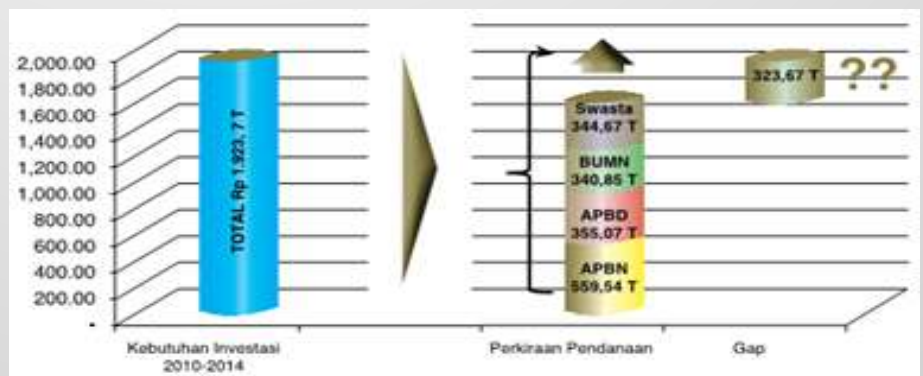
Prospek Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) di Indonesia

Disamping itu, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk guna mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah dicanangkan melalui dukungan regulasi, kelembagaan maupun pendanaan (fiskal).

Dalam bidang regulasi, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundangan diantaranya Perpres 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah diubah untuk kedua kalinya melalui Perpres 56/2011.

Dalam rangka pengembangan kerangka kelembagaan, Pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) serta Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP).

Pemerintah juga telah memberikan dukungan pendanaan untuk proyek KPS, seperti *Land Revolving Fund*, *Land Capping*, *Infrastructure Fund*,





dan *Guarantee Fund*. Disamping itu, pemerintah juga akan melanjutkan memberikan dukungan non-pendanaan guna memfasilitasi percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPS, yaitu dalam bentuk Project Development Facility (PDF) untuk penyiapan proyek KPS, penyediaan lahan yang dimiliki pemerintah, penyertaan modal sampai tingkat tertentu melalui BUMN serta insentif fiskal lainnya dan kebijakan "Land Freezing" untuk mencegah kenaikan harga tanah yang tidak terkendali.

Untuk mendukung pelaksanaan KPS di Indonesia, setiap tahun pemerintah telah menyusun daftar proyek pemerintah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta yang tertuang dalam PPP Book. Proyek pembangunan infrastruktur yang terdapat pada PPP Book terbagi atas tiga kategori yaitu proyek potensial (*potential project*), proyek prioritas (*priority project*), dan proyek siap untuk ditawarkan (*project ready for offer*). Total proyek dalam PPP Book tahun 2012 adalah 58 proyek dengan total investasi sebesar US\$ 51,205.97. Sedangkan proyek dengan kategori ready to offer yaitu Tanah Ampo Cruise Terminal di Karangasem-Bali, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road di Sumatera Utara, dan *Solid Waste Management Improvement Project* di Bandung-Jawa Barat.

Pembinaan Sumber Daya Investasi

Sumber daya investasi infrastruktur meliputi lahan, dana, dan industri konstruksi. Agar ketiga elemen tersebut dapat bersinergi dengan baik maka diperlukan instansi/lembaga pemerintah yang berwenang dalam pembinaan sumber daya investasi untuk

melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Instansi atau lembaga yang berwenang dalam pembinaan sumber daya investasi, diantaranya Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), KKPPI, P3CU, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta kementerian teknis. Pembinaan sumber daya investasi di kementerian teknis berfungsi untuk menyiapkan kebijakan yang sifatnya mikro.

Sedangkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terdapat beberapa unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan sumber daya investasi, seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan KLN serta Pusat Kajian Strategis), Badan Pembinaan Konstruksi, BPJT, dan BPPSPAM. Sedangkan di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi-Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 2 unit eselon II yang berfungsi melakukan pembinaan sumber daya investasi secara mikro dan meso, yaitu Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan (PPUK) yang melaksanakan fungsi pembinaan badan usaha penyedia jasa konstruksi dan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PPKPK) yang melaksanakan fungsi pembinaan SDM penyedia jasa konstruksi. Untuk pembinaan secara makro, dilakukan oleh Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PPSDI) yaitu dalam rangka pembinaan daya saing industri konstruksi. Dalam hal ini, PPSDI berperan sebagai katalisator dalam menyelaraskan kepentingan peningkatan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perlindungan kepentingan konstruksi nasional.

Sasaran (*outcomes*) yang diharapkan dapat diwujudkan oleh PPSDI, antara lain:

- a. Meningkatnya investasi infrastruktur pekerjaan umum;
- b. Meningkatnya daya saing

investor nasional dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum;

- c. Meningkatnya daya saing (makro) industri konstruksi nasional;
- d. Meningkatnya penguasaan pasar (market share) industri konstruksi nasional dipasar domestik maupun internasional;
- e. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan material dan peralatan konstruksi secara efektif dan efisien, khususnya bagi investasi infrastruktur pekerjaan umum.

Kegiatan pembinaan pola investasi infrastruktur diarahkan untuk merespon isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan investasi infrastruktur, khususnya infrastruktur pekerjaan umum. Isu strategis dan kendala tersebut diantaranya meliputi : 1) Adanya gap pendanaan investasi infrastruktur; 2) Kebijakan percepatan investasi infrastruktur belum efektif; 3) Masih terdapat gap antara kebijakan nasional yang bersifat makro dan kebijakan operasional yang bersifat mikro; 4) Adanya permasalahan mikro dalam proses pembebasan tanah; 5) Belum dimanfaatkannya lembaga pembiayaan secara maksimal; 6) Masih adanya permasalahan operasional yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penjaminan Pemerintah; 7) Masih sempitnya pola investasi yang diaplikasikan; 8) Luasnya rentang koordinasi diantara instansi lembaga pemerintah yang berwenang; 9) Masih rendahnya bangkitan volume lalu-lintas di berbagai ruas jalan tol; dan 10) Belum dimanfaatkannya kebijakan keringanan pajak dalam penyelenggaraan infrastruktur.

Meskipun di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terdapat beberapa unit kerja yang berkaitan dengan fungsi pembinaan sumber daya investasi, namun diharapkan antar unit-unit tersebut tidak terjadi *overlapping* tugas dan fungsi tetapi dapat saling melengkapi karena permasalahan dalam investasi tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri namun harus diselesaikan oleh semua pihak sesuai dengan komitmen dan kewenangannya.

*Berbagai sumber-Ery



MEMBANGUN STRUKTUR INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL YANG KOKOH DAN MENUNJANG PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA BAGI SELURUH PELAKU JASA KONSTRUKSI

Indonesia sebagai negara sedang berkembang membutuhkan banyak infrastruktur dan properti. Kontraktor sebagai pelaku utama (focal firm) dari industri konstruksi nasional dituntut memiliki kapasitas, kompetensi dan daya saing dalam menyelenggarakan konstruksi.

Timbul kekhawatiran, apakah klasifikasi, kualifikasi dan spesialisasi para pelaku usaha konstruksi ini sudah membentuk struktur usaha yang kokoh, andal dan berdayasaing? Aspek lain yang menjadi kekhawatiran, apakah perilaku (conduct) dalam industri konstruksi memberi peluang yang sama bagi semua pelaku usaha konstruksi tersebut? termasuk penciptaan lapangan usaha bagi pelaku usaha konstruksi skala mikro kecil dan menengah secara kondusif.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut ditindaklanjuti oleh GAPENSI, LPJK dan BP

KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, menggagas dan melaksanakan 3 (tiga) seri diskusi nasional dalam bentuk seminar dan lokakarya membangun industri konstruksi yang kokoh, andal dan daya saing dan menunjang

pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh pelaku jasa konstruksi.

Ditengarai bahwa good governance dalam industri konstruksi nasional masih menjadi masalah utama. Struktur pasar dan struktur industri



konstruksi masih mengalami ketidakseimbangan, perusahaan kontraktor spesialis belum tumbuh secara terstruktur, disamping itu, kerjasama antara kontraktor besar, menengah dan kecil serta mikro belum memiliki model yang saling menguntungkan, kontraktor besar belum semuanya mengambil peran pembinaan terhadap kontraktor mikro, kecil dan menengah.

Kapasitas, kompetensi dan daya saing kontraktor skala mikro, kecil dan menengah masih rendah dan memiliki keterbatasan akses permodalan, keterbatasan kompetensi SDM dan keterbatasan penguasaan teknologi dan sistem manajemen. Bahasan awal tersebut merupakan hasil seminar pertama yang diselenggarakan awal Mei 2012 lalu Jakarta.

Lalu dibentuklah rumusan kerangka kerja (framework) bagaimana merestrukturisasi industri konstruksi nasional (Natsir, Rivai, & Rizal, 2012), memperkuat kemitraan dalam rantai pasok konstruksi (Sukistiarso, Hanafiah, & Abduh, 2012) peningkatan kapasitas usaha skala mikro, kecil dan menengah di sektor konstruksi (Ismono, Saptodewo, & Soemardi, 2012) serta strategi peningkatan kompetensi SDM Konstruksi (Suhono, Mulyo, & Suraji, 2012). Perumusan hal-hal tersebut dilakukan melalui suatu diskusi kelompok kerja (*working group discussion*). Pembentukan rumusan kerangka tersebut merupakan seri kedua lanjutan yang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya pada pertengahan Juni lalu di Jakarta. Terdapat 4 (empat) position paper yang masing-masing disusun bersama oleh representasi pemerintah, pelaku usaha dan akademisi serta 4 (empat) position paper yang masing-masing disusun oleh representasi pemilik proyek swasta, pemilik pemerintah dan representasi otoritas moneter dan perbankan.

Selanjutnya dilakukan konsinyasi serta kemudian diverifikasi melalui pertemuan dalam bentuk seminar nasional awal Juli lalu. Hasil dari lokakarya dan konsinyasi tersebut



dirumuskan dalam bentuk dokumen position paper.

Pelaksanaan Seminar

Diskusi nasional ini telah berhasil mengungkap berbagai permasalahan ketimpangan struktur, distorsi pasar, kemitraan semu, rantai pasok rentan dan marginalisasi kontraktor mikro, kecil dan menengah. Rantai suplai konstruksi nasional belum terintegrasi secara konstruktif. Pelaku usaha jasa konstruksi dengan berbagai skala usaha belum saling berkooperasi dan berkolaborasi dalam suatu model kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win partnership*). Kontraktor skala kecil belum mendapatkan posisi yang kuat dalam sistem subkontrak dengan perusahaan besar.

Ketimpangan struktur pasar dan industri konstruksi. Secara hipotetik,

85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor non kecil dengan jumlah 5% dari total 160.000 badan usaha, sedangkan 15% nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil dengan jumlah 85% dari total 160.000 badan usaha. Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi.

Struktur industri konstruksi nasional didominasi oleh pelaku usaha jasa konstruksi berbagai skala bersifat umum/general. Spesialisasi usaha jasa konstruksi masih belum berkembang dan dipandang akan mempersempit peluang usaha, dan membatasi kesempatan usaha bagi kontraktor skala kecil.

Kontraktor skala besar seperti BUMN masih ditengarahi memiliki dominasi dan bahkan melakukan praktik

mengambil pasar konstruksi skala kecil menengah serta eksploitasi subkontraktor. Kontraktor besar dinilai belum ikut serta memberdayakan atau memberi kesempatan kepada kontraktor skala kecil lokal dimana pekerjaan konstruksi berada. Kapasitas, kompetensi dan daya saing kontraktor skala kecil terbatas. Permasalahan ini dipicu oleh keterbatasan kompetensi SDM, akses permodalan dan kemampuan peralatan/ teknologi.

Sebagai tindak lanjut perlu diwujudkan *good "construction" governance* dengan karakteristik *participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective & efficient, equitable & inclusive, dan follow the rule of law* sebagai prasyarat utama membangun struktur industri konstruksi nasional. Prasyarat ini untuk memastikan korupsi diminimalisasi, pandangan minoritas dipertimbangkan dengan baik dan suara dari pihak yang rentan diperhatikan dalam pengambilan keputusan (kebijakan),

Selain itu juga perlu dikembangkan keseimbangan ideal komposisi kontraktor generalis dan kontraktor spesialis seperti Jepang, Amerika dan Inggris memiliki komposisi hampir 30:70 dan China dengan 50:50 melalui pendekatan restrukturisasi pasar (*playing field*)



dan sistem / model kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemerintah perlu menggunakan pengadaan infrastruktur oleh Pemerintah sebagai media utama (*playing ground*) untuk memberikan kebijakan memihak (*affirmative policy*) yang memicu perkuatan struktur industri konstruksi nasional, termasuk : mengembangkan segmentasi pasar, memberi insentif bagi kontraktor skala kecil menengah spesialis, melakukan memaketkan pekerjaan bagi usaha skala kecil, menciptakan model-model kemitraan antar pelaku usaha jasa konstruksi, menciptakan peluang/ kesempatan

kerja bagi pelaku usaha jasa konstruksi daerah.

Semua pihak terkait perlu didorong untuk menegakkan etika dalam industri konstruksi yang merupakan kunci penting dalam memperkuat struktur industri konstruksi dan membangun kemitraan berdasarkan *trust, reciprocity, dan synergy* agar tercipta kerjasama saling menguntungkan antar rantai suplai konstruksi dengan menjunjung tinggi etika pribadi, etika profesional dan etika usaha.

Kemudian perlunya meninjau ulang atau melakukan restrukturisasi biaya proyek konstruksi (*cost structure*) agar komponen / elemen biaya dalam penyelenggaraan konstruksi menjadi lebih jelas. Perhitungan biaya proyek berdasarkan satuan pekerjaan dengan komponen harga satuan bahan, upah tenaga kerja dan alat tidak mengakomodasi biaya para tenaga ahli / insinyur profesional dan mengembangkan model subkontrak dan bahkan termasuk sistem perlindungan subkontraktor melalui kebijakan memihak termasuk "*payment security acts*" sebagai upaya menghilangkan praktek "*pay when to get paid*" atau kontraktor utama hanya akan membayar subkontraktor kalau sudah dibayar oleh pemilik proyek.





Pemerintah, melalui pembinaan konstruksi, memfasilitasi pengembangan usaha di sektor konstruksi dengan upaya-upaya antara lain:

- (1) Mengembangkan kerjasama kemitraan melalui prinsip kooperasi dan kompetisi,
- (2) Meningkatkan produktifitas, efisiensi, kreatifitas dan inovasi secara berkesinambungan,
- (3) Mendorong integrasi nilai dari rantai suplai konstruksi,
- (4) Merevitalisasi profesionalisme dan nasionalisme,
- (5) Merestrukturisasi sistem industri konstruksi,
- (6) Mentransformasi struktur industri konstruksi,
- (7) Membina kontraktor skala kecil menengah yang ingin menjadi kontraktor spesialis melalui inkubator bisnis konstruksi dan pelatihan SDM,
- (8) Merevitalisasi peran asosiasi badan usaha agar mampu membina dan memperjuangkan kepentingan anggotanya,
- (9) Meningkatkan aksesibilitas permodalan, pengurangan beban pajak bagi subkontraktor, dan mengeluarkan *standard form of subcontract*,

Pada akhirnya diperlukan formula untuk melakukan restrukturisasi pasar konstruksi (*playing field*) dan pengembangan model-model pemaketan proyek (*project*

packaging) dan kemudian diikuti dengan restrukturisasi industri konstruksi. Selanjutnya, reformulasi regulasi usaha dan kebijakan memihak (*affirmative policy*) perlu dilakukan untuk memastikan bahwa industri konstruksi menjadi semakin efisien, efektif, produktif, inovatif dan kompetitif serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bermain profesional di pasar global.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dari hasil seri diskusi adalah merekomendasikan 3 hal utama yaitu : Prasyarat Dasar

menegakkan nilai, etika dan kapasitas profesional, *Strategic Thrust* melalui upaya restrukturisasi sistem, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, peningkatan kompetensi SDM Konstruksi, arahan Kebijakan melalui upaya-upaya memperkuat pengawasan implementasi kebijakan, mengubah model strukturusahadari ASMET menjadi KLBI, dan menerapkan non-traditional practices misalnya DB, DBO, ECP, PBC dan sebagainya.

Untuk menggabungkan rekomendasi menjadi rencana tindak dan implementasinya dibentuk 4 (empat) kelompok kerja kecil oleh Menteri Pekerjaan Umum yang akan menyusun rumusan atau naskah yang berisi substansi tentang kerangka dan paket-paket kebijakan dan kegiatan yang terdiri atas berbagai instansi.

Diharapkan hasil/produk kerja kelompok dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu paket-paket kebijakan yang segera harus dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 dan paket-paket kebijakan jangka menengah (tahun 2015-2019) yang bukan saja menjadi tanggung jawab Kementerian PU namun juga kementerian/lembaga lain. (Hr)



PELATIHAN *GREENSHIP ASSOCIATE PLUS*

Mencetak Agen-Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, sektor bangunan dan infrastruktur berkontribusi cukup besar dalam hal emisi gas rumah kaca yang secara tidak langsung berakibat pada terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.

Di tengah-tengah isu perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, serta keterbatasan sumberdaya termasuk energi ini, maka sektor konstruksi diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi upaya mitigasi hal-hal tersebut.

Antara lain dengan penerapan praktek-praktek penyelenggaraan infrastruktur yang lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya dan energi serta ramah lingkungan sehingga akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih besar, atau yang lebih dikenal dengan konsep infrastruktur berkelanjutan (*sustainable infrastructure*).

Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, bekerjasama dengan *Green Building Council Indonesia* (GBCI) merancang pelatihan *GreenShip Associate Plus* (GA Plus) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9, 10 dan 12 Juli 2012 di Hotel Bidakara Jakarta. Aktivitas ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta untuk menumbuhkan awareness dan kepedulian para pemangku kepentingan khususnya jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya mewujudkan implementasi infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan kepedulian dan komitmen semua pihak untuk berbagi peran dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan melalui peningkatan ketahuan (*knowledge*), kemampuan

(*capacity*) dan kemauan (*actions*) baik pada tataran makro (*policy*), tataran meso strategi implementasi (*planning and control*) dan tataran mikro rancang-bangun (*design and construction*) serta operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*) suatu bangunan gedung dan infrastruktur.

Pelatihan selama 3 hari ini diikuti oleh 51 orang peserta dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Badan Pembinaan Konstruksi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Ditjen Bina Marga, Ditjen Penataan Ruang, dan Ditjen Cipta Karya. Narasumber pelatihan merupakan para pakar dari GBCI, LKPP, ITB dan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan materi pelatihan antara lain mengenai *Overcome Global Warming, International Movement to Green Concepts, Green Policy, Sustainable Construction, Future Green Technology* dan *Benefit of Green Movement*.

“sudah saatnya bagi Kementerian PU untuk serius melaksanakan pembangunan gedung dan infrastruktur berkelanjutan. Meskipun disadari bahwa untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Apalagi sebagai Negara berkembang, yang selalu dihadapkan pada isu-isu seperti kemiskinan, ledakan populasi, dan pengangguran, dimana isu-isu ini seringkali justru menjadi masalah utama daripada kerusakan lingkungan,” ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Goeritno.

Kementerian Pekerjaan Umum tentunya berperan sangat besar dalam melakukan transformasi konstruksi menuju penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan, terutama melalui pengembangan berbagai instrumen kebijakan.

Disadari, melakukan transformasi konstruksi bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang

harus dihadapi, diantaranya : Perlu adanya lompatan (*leap*) dalam teknologi konstruksi, terutama teknologi konstruksi yang dikembangkan berdasarkan konten dan konteks lokal, teknologi maju terbaru, dan filosofi alam.

Penemuan kembali (*reinventing*) industri konstruksi, dimana semua pihak terlibat dalam konstruksi ikut adil untuk merubah bahkan membuang praktek-praktek yang tidak berkelanjutan.

Pemikiran kembali (*rethinking*) produk konstruksi, baik fungsi maupun sifat alaminya, seperti dengan memperhatikan daur hidup, hubungan antara bangunan dan infrastruktur pendukung, solusi lokal, dan pengurangan penggunaan sumber daya alam.

Transformasi konstruksi dari penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur tentunya tidak dapat terwujud jika hanya dilakukan oleh Pemerintah saja. Transformasi ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam sektor konstruksi secara bersamaan agar konsep infrastruktur berkelanjutan dapat dilaksanakan dan misi konstruksi Indonesia untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan berdasarkan profesionalisme, sinergi, dan daya saing dalam konteks ke-Indonesiaan pun dapat tercapai.

Kegiatan *GreenShip Associate Plus* ini bekerja sama dengan GBCI yang telah merintis sertifikasi dan rating tools untuk bangunan hijau. Namun materi pelatihan tidak hanya mencakup sektor bangunan gedung saja, tetapi juga menyangkut infrastruktur bidang ke-PU-an lainnya. Sehingga diharapkan para peserta yang dalam kesehariannya bertanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an dapat menjadi pionir untuk merintis penerapan konsep pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan mempelajari *lessons learned* dari penyelenggaraan bangunan gedung hijau. NW.



Launching Konstruksi Indonesia : KONSEP BARU KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Event tahunan masyarakat jasa konstruksi, Konstruksi Indonesia, kembali digelar. Pada Rabu 27 Juni 2012 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto secara resmi membuka Launching Konstruksi Indonesia (KI) 2012. Dengan adanya Launching KI 2012 ini berarti seluruh rangkaian KI 2012 secara resmi telah dimulai dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Kali ini, Konstruksi Indonesia 2012 mengusung tema “Harmonisasi Konstruksi yang Berwawasan Lingkungan”.

Tema yang diangkat dan menjadi jiwa dalam rangkaian kegiatan KI 2012 diambil bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia pada tahun 2007 telah menyetujui suatu kesepakatan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan lingkungan sebagai antisipasi perubahan iklim, seperti





merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap unsur sektor Konstruksi di Indonesia harus lebih responsif terhadap kebijakan dan isu lingkungan dalam kegiatan dalam pekerjaan sektor konstruksi.

Rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia di tahun 2012 ini antara lain Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2012; Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2012; Lomba Jurnalistik/ Karya Tulis Media Cetak; Lomba Karya Tulis Ilmiah Terkait Konstruksi; Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi; Penyusunan Buku Konstruksi 2012; dan Pameran dan Seminar Konstruksi Indonesia 2012.

alih teknologi yang ramah lingkungan, *Reducing Emissions From Deforestation in Developing Countries* (REDD) yang merupakan upaya mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan lain sebagainya.

Sektor Konstruksi sebagai salah satu sektor yang berperan besar dalam perubahan lingkungan sudah selayaknya ikut mengadaptasi kesepakatan dan kebijakan tersebut. "Untuk itu, Jasa Konstruksi di Indonesia dituntut untuk siap menghadapi isu-isu lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi", tegas Djoko Kirmanto.

Menteri PU mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mencermati berbagai isu lingkungan yang dikaitkan dengan meningkatnya intensitas pembangunan. Hal ini merupakan dampak dari semakin meningkatnya masalah-masalah perubahan iklim dan pemanasan global, yang sama-sama kita hadapi dan rasakan oleh setiap bangsa dan negara di dunia.

Tidak hanya itu, adaptasi terhadap isu-isu lingkungan juga dilakukan untuk lebih memantapkan predikat Indonesia sebagai negara tujuan investasi (investment grade). Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi yang berbicara di hadapan para wartawan pada konferensi pers. Menurutnya



“... Jasa Konstruksi di Indonesia dituntut untuk siap menghadapi isu-isu lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi...”

Sebagai puncak acara Konstruksi Indonesia 2012 akan diselenggarakan Pameran Konstruksi yang mengundang keterlibatan para penyedia jasa swasta dan BUMN, industri dan supplier material serta peralatan konstruksi, para pengguna jasa, asosiasi terkait konstruksi dan jasa pendukung jasa konstruksi termasuk asuransi dan perbankan. Kegiatan pameran ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi para stakeholders jasa konstruksi dalam memamerkan produk-produknya.

Pameran Konstruksi akan dilaksanakan pada 29 November s.d. 02 Desember 2012 di Parkir Timur Senayan, dan dimeriahkan pada puncak acaranya tanggal 02 Desember 2012 dengan kegiatan Jakarta Construction Fun Bike dan Fun Walk.

Menariknya, Launching KI 2012 kali ini dilaksanakan di Gedung Utama (Hijau) Kementerian PU, yang mendapat predikat *Platinum* dari *Green Building Council Indonesia* (GBCI) sebagai Bangunan Hijau. Gedung ini diresmikan Menteri PU pada 1 Juni 2012 lalu, dan memang sengaja dibangun sebagai komitmen Kementerian PU untuk mengurangi emisi CO₂ dan membangun gedung-infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, pada Launching KI 2012 juga dimeriahkan dengan sajian parade busana Batik dan Tenun karya desainer asli Indonesia, dengan dimeriahkan tarian-tarian tradisional seperti Tari Lenggang Nyai, Legeng Keraton, Gitek Balen, dan Enggang Kalimantan.

Kita harapkan Konstruksi Indonesia 2012 dapat menjadi ajang bersama yang semakin mengharmonisasi seluruh bagian sektor konstruksi nasional, dalam sebuah lingkungan yang berwawasan lingkungan. *Tw



SERAH TERIMA JABATAN DI LINGKUNGAN BP KONSTRUKSI : HARAPAN AKAN APRESIASI TUGAS BP KONSTRUKSI YANG SEMAKIN MENINGKAT



Sebagai sebuah organisasi, pergantian jabatan dan kaderisasi merupakan sebuah keniscayaan. Demikian juga dengan Badan Pembinaan Konstruksi yang merupakan sebuah organisasi birokrasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Pada 30 Juli 2012 yang lalu dilakukan serah terima jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno.

Jabatan yang diserahterimakan yaitu : Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi yang sebelumnya dijabat oleh Soekistiarso diserahterimakan kepada Agus Raharjo, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi yang semula dijabat oleh Andreas Suhono diserahterimakan kepada Panani Kesai, dan Kepala Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi dari Sumihar Simamora kepada Doedoeng Zaenal Arifin.

Pejabat lama dalam hal ini Soekistiarso dan Sumihar Simamora telah memasuki masa pensiun, sedangkan Andreas Suhono mengembankan amanah baru sebagai

Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU. Selain itu dilakukan juga penyerahan jabatan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi dari Pandu Gunadi kepada Doedoeng Zaenal Arifin.

“Yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan potensi untuk kemajuan bersama dan tentunya untuk melaksanakan amanah yang dibebankan di pundak masing-masing”, tutur Bambang Goeritno.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, seiring berjalannya waktu apresiasi terhadap tugas-tugas Badan Pembinaan Konstruksi makin meningkat. Terbukti dengan makin seringnya BP Konstruksi menjadi acuan, tidak hanya oleh pihak-pihak internal Kementerian PU tapi juga oleh pihak diluar Kementerian PU.

“Karena itu setiap pegawai di lingkungan BP Konstruksi harus menjaga amanah ini dengan meningkatkan kinerja. Sebab kita tahu sendiri menjaga prestasi lebih berat dari meningkatkan”, ujar Bambang Goeritno.

Disebutkan Bambang Goeritno bahwa beberapa waktu yang lalu

pihak dari Kemenpora melakukan kunjungan kerja ke BP Konstruksi untuk belajar bagaimana melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang aman dan sesuai peraturan berlaku.

Terkait dengan sumber daya manusia, peran dan tugas Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi untuk melatih tenaga kerja konstruksi terampil sangat ditunggu oleh pemerintah daerah bahkan oleh asosiasi-asosiasi di seluruh Indonesia.

Sedangkan tugas Pusat Sumber Daya Investasi juga tidak ringan. Bagaimana mengelola investasi dalam semangat nasionalisme, Pusat ini harus dapat memastikan pasokan material dan alat berat yang akhir-akhir ini perlu perhatian, mengingat beberapa material ketersediaannya ternyata tidak sesuai permintaan.

Menurut Kepala BP Konstruksi, saat ini semen mulai kekurangan jumlahnya di pasar. Demikian juga dengan Baja yang belum terdistribusi dengan baik. Selain itu BP Konstruksi juga sedang mendorong pemaksimalan penggunaan aspal Asbuton, untuk mengurangi impor aspal dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Sehubungan dengan telah dikukuhkannya pengurus LPJK di 33 Provinsi oleh Gubernur masing-masing daerah, maka sekarang tugas BP Konstruksi dalam hal ini Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan untuk memastikan LPJK Daerah bekerja dengan baik terutama dalam proses sertifikasi.

Dan tidak lupa, tugas Sekretariat BP Konstruksi untuk mendukung semua tugas dan kebutuhan Pusat-Pusat di Lingkungan BP Konstruksi dapat terjamin. Diharapkan dengan maksimalnya masing-masing unit kerja melaksanakan tugasnya, Jasa Konstruksi di Indonesia semakin lebih baik. *Tw

Sukseskan



KONSTRUKSI INDONESIA 2012



PAMERAN DAN SEMINAR KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Parkir Timur Senayan, 29 November - 02 Desember 2012



Kementerian Pekerjaan Umum



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

Organized by INMARK Group



www.inmarkcomm.com



www.inmark-event.com